## FAKTOR-FAKTOR YANG MEMENGARUHI PENGUNGKAPAN BELANJA

## BANTUAN SOSIAL PADA LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN

#### 2012-2014

(Studi Pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi DIY dan

Jawa Tengah)

This research aims to analyze the factors that influence the disclosure of social assistance expenditure on a government financial report which was 2012-2014. Research methodology used in this research is the method purposive sampling. The population and sample used is districts in DIY and Central Java provinces. Data is collected through Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) and Badan Pusat Statistik (BPS).

The result of the research indicated that intergovernmental revenue, local resources, and the population of the influential positive impact and significant impact on the disclosure of expenditure social assistance in a financial statement of the local governments district in DIY and Central Java provinces.

Key words: disclosure, financial statement, local government, social assistance expenditure

## **PENDAHULUAN**

Sejak reformasi tahun 1998 Indonesia mengubah sistem pemerintahan daerahnya, dari sistem sebelumnya yang menerapkan sistem sentralisasi menjadi sistem desentralisasi. Sistem desentralisasi yaitu sistem pemerintahan yang menyerahkan segala kekuasaan dan kewajiban kepada daerah otonom untuk mengurus dan mengatur sendiri urusan dan kepentingan masyarakat serta urusan pemerintahannya guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan peraturan dan undang-undang yang berlaku.

Pelaksanaan otonomi daerah disertai dengan pengalihan anggaran dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah, salah satunya adalah dana bantuan sosial (Darmastuti & Setyaningrum,

2009). Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri No 32 Tahun 2011, bantuan sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial. Bantuan sosial dapat berupa tunjangan uang, pelayanan sosial atau barang yang diberikan untuk membantu atau melindungi setiap individu, keluarga dan komunitas yang paling rentan, sehingga kebutuhan dasar dapat terpenuhi dan kualitas hidup dapat meningkat (Suharto, 2009).

Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 menjadi dasar dalam pengelolaan keuangan daerah. Dasar dalam penyalurannya didasarkan pada Permendagri No. 13 Tahun 2006. Peraturan tersebut memberikan wewenang kepada kepala daerah tanpa adanya kontrol, sehingga menimbulkan adanya perbedaan regulasi mengenai bantuan sosial (Darmastuti & Setyaningrum, 2009). Perbedaan regulasi terhadap dana Bansos menyebabkan banyak terjadi penyelewengan dana Bansos yang dilakukan oleh kepala daerah.

Akhir-akhir ini, banyak terungkap kasus penyelewengan dana bantuan sosial di Indonesia. Pada rentang waktu tahun 2003 hingga 2015, sedikitnya terdapat 56 kepala daerah di Indonesia yang ditangkap oleh KPK karena kasus korupsi dana Bansos. Kasus terakhir adalah kasus penyelewengan dana bantuan sosial oleh Gubernur Sumatera Utara, Gatot Pujo Nugroho. Dalam kasusnya, Gatot dituduh melakukan suap kepada anggota DPRD Sumatera Utara berkenaan dengan persetujuan laporan pertanggungjaaban Pemprov Sumut tahun 2012-2014 dan persetujuan perubahan APBD Sumut tahun 2013-2014 (SINDOnews).

Akibat banyaknya kasus yang muncul mengenai penyelewengan dana Bansos, maka Kementrian Dalam Negeri mengeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari APBD. Dengan

dikeluarkannya peraturan tersebut, prosedur untuk penerimaan dan penyaluran dana Bansos menjadi sangat ketat. Pemerintah daerah harus menggunakan dana bansos dan penerimaan hibah dengan penuh tanggung jawab. Namun, peraturan tersebut masih dapat dilanggar karena tidak adanya batasan mengenai jumlah anggaran yang disediakan dan pengawasan dalam penggunaan dana tersebut.

Pengawasan dalam penggunaan dana Bansos dapat dilakukan dengan mengakses laporan keuangan pemerintahan. Laporan keuangan merupakan salah satu bentuk transparansi yang menunjukkan adanya keterbukaan dari pemerintah daerah akan pengelolaan daerahnya (Andriani, 2002). Namun, kurangnya transparansi pemerintah akan informasi pemerintahan menyebabkan masyarakat sulit untuk mengakses dan melakukan pengungkapan akan laporan keuangan pemerintahan (Istinawati, 2012).

Dalam pemerintahan, digunakan pengungkapan wajib untuk mengungkapkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) diperlukan dalam pertanggungjawaban keuangan daerah. Pengungkapan wajib atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah terhadap SAP di Indonesia masih sangat rendah. SAP telah ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005 (Lesmana, 2010). SAP menjadi salah satu dasar dalam melakukan penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. SAP memberikan informasi mengenai penyajian yang diharuskan dalam laporan keuangan dan pengungkapan laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan APBD/APBN (Usman, dkk, 2014).

Penelitian yang dilakukan oleh Lesmana (2010) yang berjudul Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap Tingkat Pengungkapan Wajib di Indonesia menjelaskan bahwa karakteristik pemerintah daerah memiliki sifat yang khas dari otoritas administratif pada masingmasing daerah. Pengalaman dalam hal administratif keuangan pemerintah daerah yang lebih tua

dimungkinkan menjadi faktor penyebab adanya pengaruh tingkat pengungkapan wajib, meskipun pengetahuan sumber daya manusia di pemerintahan daerah mengenai pengetahuan akuntansi masih relatif rendah. Ingram (1984) melakukan penelitian untuk melihat hubungan antara faktor ekonomi dan variasinya dalam praktik akuntansi di pemerinthan di Negara bagian Amerika Serikat. Ingram (1984) menggunakan empat faktor ekonomi dan politik yang digunakan sebagai variabel independen, yaitu condition of voters, administrative selection process, alternative information source, dan management incentive.

Hilmi & Martani (2012) melakukan penelitian tentang faktor-faktor yang memengaruhi tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah provinsi tahun 2006-2009. Hilmi & Martani (2012) menggunakan 8 variabel independen, yaitu tingkat pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) provinsi, jumlah kekayaan daerah, tingkat ketergantungan pemerintah provinsi, jumlah aset pemerintah provinsi, jumlah penduduk provinsi, jumlah SKPD provinsi, jumlah temuan berdasarkan hasil pemeriksaan BPK, dan tingkat penyimpangan berdasarkan hasil pemeriksaan BPK. Tingkat pengungkapan yang dilakukan oleh pemerintah daerah masih rendah, tetapi tingkat pengungkapan yang dilakukan oleh pemerintah provinsi terus meningkat dari tahun 2006 hingga tahun 2009. Dari penelitian tersebut, variabel kekayaan daerah, jumlah penduduk, tingkat penyimpangan berdasarkan hasil pemeriksaan BPK berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan.

Darmastuti & Setyaningrum (2009) melakukan penelitian yang menguji pengaruh beberapa karakteristik pemerintah daerah yang dikelompokkan menjadi lingkungan internal dan lingkungan eksternal terhadap pengungkapan rincian belanja bantuan sosial di Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) pada LKPD. Variabel independen yang digunakan dalam penelitian tersebut yaitu kapasitas fiskal, *legislature size*, diferensiasi fungsional, spesialisasi pekerjaan,

ukuran pemerintah daerah, umur administratif pemerintah daerah, rasio kemandirian keuangan daerah, pembiayaan utang, dan *intergovernmental revenue*. Hasil penelitian membuktikan bahwa 2 dari 9 variabel independen yang diuji, yaitu variabel pembiayaan utang dan *intergovernmental revenue* berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan belanja bantuan sosial.

## PENGEMBANGAN HIPOTESIS

## 1. Intergovernmental Revenue

Semakin besar *intergovernmental revenue* yang di dapat oleh pemerintah daerah, maka kinerja pemerintah daerah juga akan meningkat karena dana yang didapat dari pemerintah pusat digunakan pemerintah daerah untuk membangun fasilitas untuk masyarakat dan meningkatkan pelayanan masyarakat. Meningkatnya kinerja pemerintah dapat dapat menjadi dorongan bagi pemerintah daerah untuk memberikan pertanggungjawaban berupa pelaporan dan pengungkapan terhadap laporan keuangan pemerintah daerah, termasuk pengungkapan terhadap belanja bantuan sosial yang berada di dalamnya.

Martani & Liestiani (2005) menggunakan *intergovernmental revenue* sebagai proksi untuk mengukur variabel tingkat ketergantungan terhadap pemerintah pusat. Hasil penelitian Martani & Liestiani (2005) tidak menemukan adanya hubungan antara tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap dana dari pemerintah pusat dengan tingkat pengungkapan. Sedangkan, Darmastuti & Setyaningrum (2009) dalam penelitiannya menemukan adanya pengaruh yang signifikan terhadap pengungkapan belanja bantuan sosial.

 $H_1$ : Intergovernmental revenue berpengaruh positif terhadap pengungkapan belanja bantuan sosial.

## 2. Pembiayaan Utang

Kepatuhan terhadap standar serta pengungkapan laporan keuangan menjadi informasi penting bagi kreditor karena dengan informasi tersebut dapat digunakan untuk meyakinkan kreditur atas kemampuan debitur dalam memenuhi kewajibannya. Kreditur akan melakukan pengawasan terhadap debitur untuk memastikan bahwa debitur dapat memenuhi kewajibannya.

(Patrick, 2007) dalam penelitiannya, variabel pembiayaan utang berpengaruh positif dan signifikan dengan determinasi dalam mengadopsi *Governmental Accounting Standards Board* (GASB) 34 terhadap pembiayaan utang. Namun, pada penelitian Lesmana (2010) yang melakukan pengujian pengaruh kewajiban (hutang pemerintah daerah) terhadap tingkat pengungkapan wajib tidak menemukan adanya pengaruh jumlah kewajiban dengan tingkat pengungkapan pada Laporan Keuangan Pemerintah daerah (LKPD).

H<sub>2</sub>: Pembiayaan utang berpengaruh positif terhadap pengungkapan belanja bantuan sosial.

# 3. Kekayaan Daerah

Pendapatan Asli Daerah dapat menyatakan kekayaan suatu daerah. Semakin tinggi pendapatan asli daerah, semakin besar jumlah kekayaan daerah. Dengan begitu diharapkan semakin besar kekayaan daerah, maka dapat diimbangi dengan pelaporan keuangan yang baik, termasuk melakukan pengungkapan terhadap belanja bantuan sosial.

Penelitian yang dilakukan oleh Hilmi & Martani (2012) menunjukkan adanya pengaruh yang positif dan signifikan terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah. Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Setyaningrum & Syafitri (2012) juga menunjukkan hasil adanya pengaruh yang positif dan signifikan.

# H<sub>3</sub>: Kekayaan daerah berpengaruh positif terhadap pengungkapan belanja bantuan sosial.

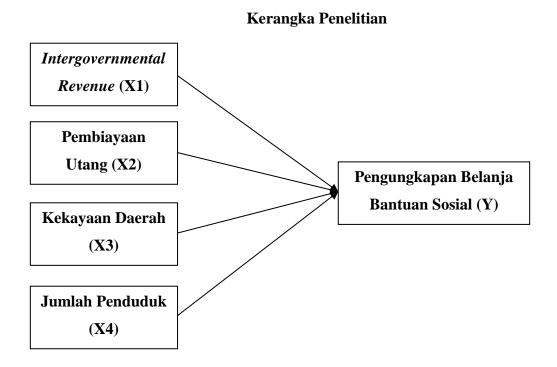
## 4. Jumlah Penduduk

Jumlah penduduk merupakan proksi dari kompleksitas pemerintahan. Kompleksitas pemerintahan tidak akan menghambat tingkat pengungkapan, tetapi akan meningkatkan tingkat pengungkapan. Semakin besar jumlah penduduk, maka akan semakin besar pula dorongan dari masyarakat untuk melakukan pengungkapan pada laporan keuangan pemerintah.

Penelitian yang dilakukan oleh Hilmi & Martani (2012) menunjukkan bahwa jumlah penduduk berpengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan. Penelitian tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Martani & Liestiani (2005) yang menunjukkan adanya pengaruh positif jumlah penduduk terhadap tingkat pengungkapan.

# H<sub>4</sub>: Jumlah penduduk berpengaruh positif terhadap pengungkapan belanja bantuan sosial.

Gambar 2.1.



## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan data sekunder. Obyek yang digunakan dalam penelitian ini adalah pemerintah kabupaten/kota di DIY dan Jawa Tengah pada tahun 2012 - 2014. Subyek penelitian ini menggunakan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) kabupaten/kota di DIY dan Jawa Tengah tahun 2012-2014 yang telah di audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan jumlah penduduk kabupaten/kota di Provinsi DIY dan Jawa Tengah tahun 2012-2014. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan melihat Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang telah diaudit oleh BPK.

# Pengukuran Variabel

# 1. Belanja Bantuan Sosial

Pengukuran dilakukan dengan menggunakan sistem *scorring*. Sistem *scorring* dilakukan dengan membuat daftar *checklist* pengungkapan dalam belanja bantuan sosial sesuai dengan Buletin Teknis Standar Akuntansi Pemerintahan No. 10. Tingkat pengungkapan belanja bantuan sosial dihitung dengan jumlah item yang diungkapkan/total item yang harus diungkapkan.

## 2. Intergovernmental Revenue

Intergovernmental Revenue merupakan pendapatan yang diterima pemerintah daerah yang berasal dari sumber eksternal dan tidak memerlukan adanya pembayaran kembali (Patrick, 2007). Pengukuran intergovernmental revenue dalam penelitian ini menggunakan perbandingan total dana permbangan dengan total pendapatan.

# 3. Pembiayaan Utang

Pembiayaan utang adalah proses meningkatkan jumlah utang untuk modal kerja atau modal belanja dengan menerbitkan surat utang jangka panjang, seperti obligasi atau surat utang lain. Pengukuran pembiayaan utang dalam penelitian ini menggunakan perbandingan total kewajiban dengan total ekuitas.

# 4. Kekayaan Daerah

Kekayaan daerah dapat dilihat dari jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang diterima. Pengukuran kekayaan daerah dalam penelitian ini menggunakan perbandingan total PAD dengan pendapatan.

# 5. Jumlah Penduduk

Penduduk adalah kumpulan orang atau populasi yang mendiami atau menduduki suatu wilayah dalam kurun waktu tertentu. Variabel ini merupakan jumlah penduduk yang menempati wilayah di kabupaten/kota DIY dan Jawa Tengah.

Dengan menggunakan regresi linier berganda, maka model penelitian dalam penelitian ini :

PBBS = 
$$\alpha + \beta_1 IR + \beta_2 PU + \beta_3 KD + \beta_4 JP + e$$

# Keterangan:

PBBS: Pengungkapan Belanja Bantuan Sosial

IR : Intergovernmental Revenue

PU : Pembiayaan Utang

JP : Jumlah Penduduk

KD : Kekayaan Daerah

α : Konstan

 $β ... β_4$ : Koefisien regresi

e : error

# **HASIL PENELITIAN**

Dalam penelitian ini menggunakan *casewase list* untuk mengetahui adanya *outlier*. *Outlier* harus dihilangan karena dapat menimbulkan nilai residual yang besar. Dari 120 sampel awal, terdapat 12 sampel yang tidak lengkap dan 48 sampel yang masuk dalam *casewase list*. Sehingga 48 sampel tersebut harus dibuang dan tersisa 60 sampel. Berikut adalah prosedur pemilihan sampel penelitian:

Tabel 4.1.
Prosedur Pemilihan Sampel

Uraian	2012	2013	2014	Total
LKPD yang sudah diaudit	40	40	40	120
LKPD yang tidak lengkap	(4)	(4)	(4)	(12)
Total Sampel	36	36	36	108
Data outlier	(16)	(16)	(16)	(48)
Total sampel yang diteliti	20	20	20	60

Tabel 4.2.
Statistik Deskriptif
Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
IR	60	,0196	,6391	,555150	,0829099
PU	60	,0000	,5512	,012833	,0707750
KD	60	,0623	,3596	,129630	,0523198
LN_PB	60	,0000	1,3863	1,066787	,2031901
LN_JP	60	2,5177	2,6631	2,607271	,0355882
Valid N (listwise)	60				

Tabel 4.2. menunjukkan bahwa banyaknya sampel dalam penelitian ini adalah 60 sampel. Variabel pengungkapan belanja bantuan sosial memiliki nilai minimum sebesar 0,0000. Nilai maksimum sebesar 1,3863. Nilai rata-rata (*mean*) sebesar 1,066787. Nilai simpangan baku (*std. deviation*) sebesar 0,2031901. Variabel *intergovernmental revenue* memiliki nilai minimum sebesar 0,0000. Nilai maksimum sebesar 0,5512. Nilai rata-rata (*mean*) sebesar 0,012833. Nilai simpangan baku (*std. deviation*) sebesar 0,0707750. Variabel pembiayaan utang memiliki nilai minimum sebesar 0,0623. Nilai maksimum sebesar 0,5512. Nilai rata-rata (*mean*) sebesar 0,129630. Nilai simpangan baku (*std. deviation*) sebesar 0,0707750. Variabel kekayaan daerah memiliki nilai minimum sebesar 0,0000. Nilai maksimum sebesar 0,3596. Nilai rata-rata (*mean*) sebesar 0,129630. Nilai simpangan baku (*std. deviation*) sebesar 0,0523198. Variabel jumlah penduduk memiliki nilai minimum sebesar 2,5177. Nilai maksimum sebesar 2,6631. Nilai rata-rata (*mean*) sebesar 2,607271. Nilai simpangan baku (*std. deviation*) sebesar 0,0355882.

Tabel 4.3.
Uji Normalitas
Tests of Normality

	Kolmogorov-Smirnov <sup>a</sup>			Shapiro-Wilk			
	Statistic	df	Sig.	Statistic	df	Sig.	
Unstandardized Residual	,122	60	,126	,917	60	,001	

## a. Lilliefors Significance Correction

Tabel 4.3. menunjukkan hasil bahwa nilai sig. sebesar  $0,126 > \alpha$  (0,05). Maka, dapat disimpulkan bahwa data pada penelitian ini berdistribusi normal.

Tabel 4.4.
Uji Autokorelasi
Model Summary<sup>b</sup>

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,957ª	,916	,910	,0610256	1,741

a. Predictors: (Constant), LN\_JP, PU, IR, KD

b. Dependent Variable: LN\_PB

Tabel 4.4. menunjukkan nilai Durbin-Watson (DW) sebesar 1,741. Nilai DW berada di antara nilai DU (1,7274) dan nilai 4-DU (2,2726). Maka, dapat disimpulkan bahwa data dalam penelitian ini tidak terdapat autokorelasi.

Tabel 4.5.

Uji Multikolinearitas

Coefficients<sup>a</sup>

	-	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients			Collin Stati	,
Mode	I	В	Std. Error	Beta	t	Sig.	Tolerance	VIF
1	(Constant)	-1,769	,613		-2,884	,006		
	IR	1,734	,105	,707	16,553	,000	,837	1,195
	PU	-2,005	,112	-,698	-17,828	,000	,996	1,004
	KD	1,283	,171	,330	7,506	,000	,790	1,266
	LN_JP	,665	,230	,116	2,884	,006	,938	1,066

a. Dependent Variable: LN\_PB

Tabel 4.5. di atas menunjukkan hasil berupa nilai VIF dan *Tolerance* pada masing-masing variabel. Nilai VIF dan *Tolerance* pada *intergovernmental revenue* sebesar 1,195 dan 0,837. Nilai VIF dan *Tolerance* pada pembiayaan utang sebesar 1,004 dan 0,996. Nilai VIF dan *Tolerance* pada kekayaan daerah sebesar 1,266 dan 0,790. Nilai VIF dan *Tolerance* pada jumlah penduduk sebesar

1,066 dan 0,938. Masing-masing variabel memiliki nilai VIF  $\leq$  10 dan nilai *tolerance* > 1. Maka, dapat disimpulkan bahwa data dalam penelitian ini tidak terdapat multikolinearitas.

Tabel 4.6.

Uji Heteroskedastisitas

Coefficients<sup>a</sup>

		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
	Model	В	Std. Error	Beta	t	Sig.
1	(Constant)	-,706	,376		-1,878	,066
	IR	-,163	,064	-,333	-2,532	,114
	PU	-,079	,069	-,139	-1,152	,254
	KD	-,123	,105	-,159	-1,175	,245
	LN_JP	,328	,141	,288	2,323	,133

a. Dependent Variable: ABS\_RES

Tabel 4.6. diatas menunjukkan nilai sig masing-masing variabel. Nilai sig dari intergovernmental revenue sebesar 0,114. Nilai sig dari pembiayaan utang sebesar 0,254. Nilai sig dari kekayaan daerah sebesar 0,245. Nilai sig dari jumlah penduduk sebesar 0,245. Masing-masing variabel memiliki nilai sig  $> \alpha$  (0,05). Maka, dapat disimpulkan bahwa data dalam penelitian ini tidak terdapat heteroskedastisitas.

Tabel 4.7.

Uji Koefisien Determinasi

Model Summary<sup>b</sup>

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,957ª	,916	,910	,0610256	1,741

a. Predictors: (Constant), LN\_JP, PU, IR, KD

b. Dependent Variable: LN\_PB

Tabel 4.7. diatas menunjukkan nilai *adjusted R square* sebesar 0,910. Nilai tersebut menunjukkan bahwa 91% pengungkapan belanja bantuan sosial dapat dijelaskan oleh faktor-faktor *intergovernmental revenue*, pembiayaan utang, kekayaan daerah, dan jumlah penduduk. Sedangkan sisanya 9% (100%-91%) dijelaskan oleh variabel bebas lainnya yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

Tabel 4.8.
Uji Statistik F
ANOVA<sup>a</sup>

M	lodel	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	2,231	4	,558	149,771	,000 <sup>b</sup>
	Residual	,205	55	,004		
	Total	2,436	59			

a. Dependent Variable: LN\_PB

b. Predictors: (Constant), LN\_JP, PU, IR, KD

Tabel 4.8. diatas menunjukkan nilai F sebesar 149,771 dan nilai sig sebesar  $0,000 < \alpha$  (0,05). Maka, dapat disimpulkan bahwa variabel *intergovernmental revenue*, pembiayaan utang, kekayaan daerah, dan jumlah penduduk secara stimultan bersama-sama berpengaruh terhadap variabel pengungkapan belanja bantuan sosial.

Tabel 4.9.

Uji Statistik t

Coefficients<sup>a</sup>

	Unstandardize Coefficients			Standardized Coefficients			Collin Stati	
Mode	el	В	Std. Error	Beta	t	Sig.	Tolerance	VIF
1	(Constant)	-1,769	,613		-2,884	,006		
	IR	1,734	,105	,707	16,553	,000	,837	1,195
	PU	-2,005	,112	-,698	-17,828	,000	,996	1,004
	KD	1,283	,171	,330	7,506	,000	,790	1,266
	LN_JP	,665	,230	,116	2,884	,006	,938	1,066

a. Dependent Variable: LN\_PB

Dari tabel 4.9. diatas dapat diperoleh persamaan regresi dalam penelitian ini :

$$PBBS = -1,769 + 1,734 IR - 2,005 PU + 1,283 KD + 0,665 JP + e$$

Variabel *intergovernmental revenue* memiliki nilai koefisien regresi sebesar 1,734 dengan arah positif dan nilai sig  $0,000 < \alpha$  (0,05). Hal ini menunjukkan bahwa hipotesis pertama (H<sub>1</sub>) **diterima**. Maka, dapat disimpulkan bahwa *intergovernmental revenue* berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan belanja bantuan sosial.

Variabel pembiayaan utang memiliki nilai koefisien regresi sebesar 2,005 dengan arah negatif dan nilai sig  $0,000 < \alpha$  (0,05). Hal ini menunjukkan bahwa hipotesis kedua (H<sub>2</sub>) **ditolak**. Maka, dapat disimpulkan bahwa pembiayaan utang tidak berpengaruh terhadap pengungkapan belanja bantuan sosial.

Variabel kekayaan daerah memiliki nilai koefisien regresi sebesar 1,283 dengan arah positif dan nilai sig  $0,000 < \alpha$  (0,05). Hal ini menunjukkan bahwa hipotesis ketiga (H<sub>3</sub>) **diterima**. Maka, dapat disimpulkan bahwa kekayaan daerah berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan belanja bantuan sosial.

Variabel jumlah penduduk memiliki nilai koefisien regresi sebesar 0,665 dengan arah positif dan nilai sig 0,006  $< \alpha$  (0,05). Hal ini menunjukkan bahwa hipotesis keempat (H<sub>4</sub>) **diterima**. Maka, dapat disimpulkan bahwa jumlah penduduk berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan belanja bantuan sosial.

## Pembahasan

# 1. Pengaruh intergovernmental revenue terhadap pengungkapan belanja bantuan sosial

Semakin tinggi tingkat *intergovernmental revenue* memberikan tekanan kepada pemerintah daerah untuk melakukan pengungkapan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang termasuk didalamnya yaitu belanja bantuan sosial. Hal ini membuktikan bahwa adanya kontrol yang baik dari pemerintah pusat terhadap penggunaan dana perimbangan di pemerintah daerah.

Hasil pengujian hipotesis pertama dalam penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Darmastuti & Setyaningrum (2009) mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi pengungkapan belanja bantuan sosial pada laporan keuangan pemerintah daerah. Namun, hasil pengujian hipotesis pertama dalam penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Martani & Liestiani (2005).

## 2. Pengaruh pembiayaan utang terhadap pengungkapan belanja bantuan sosial

Hasil dari pengujian menunjukkan bahwa hipotesis kedua (H<sub>2</sub>) ditolak, artinya pembiayaan utang tidak berpengaruh terhadap pengungkapan belanja bantuan sosial. Hal ini dapat disebabkan besarnya nilai utang pemerintah daerah dalam laporan keuangan yang ratarata menunjukkan jumlah utang jangka panjang yang besar. Utang jangka panjang tersebut dapat diperoleh pemerintah daerah dari utang kepada luar negeri yang diterima melalui pemerintah pusat.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Lesmana (2010) tentang pengaruh kewajiban terhadap tingkat pengungkapan wajib. Namun, penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Darmastuti & Setyaningrum (2009) yang menunjukkan adanya pengaruh pembiayaan utang terhadap pengungkapan belanja bantuan sosial.

## 3. Pengaruh kekayaan daerah terhadap pengungkapan belanja bantuan sosial

Semakin besar kekayaan daerah semakin besar tekanan pemerintah daerah untuk melakukan pengungkapan terhadap laporan keuangan. Hal ini juga dapat disebabkan kesadaran masyarakat untuk membayar retribusi daerah dan pajak yang menjadi pendapatan terbesar PAD. Sehingga pemerintah menjadi terdorong untuk melakukan pengungkapan laporan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Hilmi & Martani (2012) tentang pengaruh kekayaan daerah terhadap pengungkapan laporan keuangan pemerintah provinsi. Begitu juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Setyaningrum & Syafitri (2012) yang melakukan penelitian tentang pengaruh kekayaan pemerintah daerah terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan.

## 4. Pengaruh jumlah penduduk terhadap pengungkapan belanja bantuan sosial

Hasil pengujian menunjukkan bahwa hipotesis keempat (H<sub>4</sub>) diterima, artinya terdapat pengaruh jumlah penduduk terhadap pengungkapan belanja bantuan sosial. Jumlah penduduk yang besar sangat berpengaruh pada kinerja pemerintahn. Salah satunya yaitu dapat mendorong pemerintah daerah untuk melakukan pengungkapan terhadap laporan keuangan pemerintah daerah, termasuk belanja bantuan sosial yang berada didalamnya.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Hilmi & Martani (2012) tentang pengaruh jumlah penduduk terhadap pengungkapan laporan keuangan pemerintah provinsi. Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Martani & Liestiani, 2005) yang melakukan penelitian mengenai pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

Penelitian ini menguji tentang pengungkapan belanja bantuan sosial yang berada di dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CALK) laporan keuangan pemerintah daerah kabupaten/kota di Provinsi DIY dan Jawa Tengah tahun 2012-2014. Hasil dari penelitian ini menunjukkan tiga dari empat variabel signifikan dan berpengaruh positif terhadap pengungkapan belanja bantuan sosial. Variabel pembiayaan utang menunjukkan pengaruh negatif terhadap pembiayaan utang.

Dalam penelitian ini hanya menggunakan 4 variabel, yaitu *intergovernmental revenue*, pembiayaan utang, kekayaan daerah, dan jumlah penduduk, sehingga nilai koefisien determinasi yang diperoleh rendah. Jumlah sampel yang digunakan hanya 40 kabupaten/kota di Provinsi DIY dan Jawa Tengah, sehingga tingkat generalisasi rendah. Periode pengamatan yang relatif pendek hanya tahun 2012-2014, sehingga hasil penelitian kurang mencerminkan kenyataan yang sesungguhnya.

Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat menambahkan jumlah variabel penelitian agar dapat melihat berbagai faktor lain yang dapat mendorong terjadinya pengungkapan belanja bantuan sosial. Sampel yang digunakan dapat seluruh kabupaten/kota di seluruh provinsi di Indonesia agar dapat meningkatkan tingkat generalisasi. Menambahkan kriteria pengungkapan wajar atau tidak wajar pada kriteria *purposive sampling*. Membandingkan pengungkapan belanja

antuan sosial sebelum dan sesudah ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri No 32 Tahun	
011.	

## DAFTAR PUSTAKA

- Andriani, W., & Ak, M. S. (2002). Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Keterandalan dan Ketepatwaktuan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi pada Pemerintah Daerah Kab. Pesisir Selatan).
- Darmastuti, D., & Setyaningrum, D. (2009). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pengungkapan Belanja Bantuan Sosial Pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Pada Tahun 2009.
- Hilmi, A. Z., & Martani, D. (2012). Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah provinsi.
- Ingram, R. W. (1984). Economics Incentives abd The Choice of State Government Accounting Practices. *Journal of Accounting Research*, Vol.27(No. 1), Page 126-144.
- Istinawati, R. (2012). Analisis Faktor-Faktor yang Berpengaruh Terhadap Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi D.I. Yogyakarta. Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- Lesmana, S. I. (2010). Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap Tingkat Pengungkapan Wajib di Indonesia. Universitas Sebelas Maret.
- Martani, D., & Liestiani, A. (2005). Disclosure of Local Government Financial Statement in Indonesia.
- Patrick, A. P. (2007). The Determinant of Organizational Inovativeness: The Adoption of GASB 34 in Pennsylvania Local Government. Pennsylvania State University.
- Setyaningrum, D., & Syafitri, F. (2012). Analisis pengaruh karakteristik pemerintah daerah terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Indonesia*, Vol. 9, Hal. 154-170.
- Suharto, E. (2009). Kemiskinan dan Perlindungan Sosial di Indonesia: Menggagas Model Jaminan Sosial Universal Bidang Kesehatan. Bandung: Alfabeta.
- Usman, Sunandar, & Farida, I. (2014). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi Akuntansi Akrual pada Entitas Pemerintah Daerah. *Jurnal Akuntansi Dan Investasi*, *Vol* 15(No 2), Hal 101-113.